

RAIH PERAK KEJUARAAN DUNIA Apri/Fadia Ukir Sejarah

JAKARTA (KR) - Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengukir sejarah dengan meraih medali perak pertama dalam 28 tahun bagi ganda putri Indonesia pada ajang Kejuaraan Dunia BWF 2023 di Copenhagen Denmark, Minggu (27/8) malam. Perjuangan Apri/Fadia untuk menciptakan rekor sebagai ganda putri Indonesia pertama yang menjuarai Kejuaraan Dunia BWF harus pupus di tangan pasangan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan di babak final.

Duo Indonesia itu dipaksa tunduk dalam dua gim langsung 21-16, 21-12, sebagaimana laporan BWF menyebutkan dalam laman resminya. Meski harus puas sebagai runner-up, Apri/Fadia juga mencatatkan rekor sebagai ganda putri Indonesia ketiga yang

* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Adhitya Asros

Pemain PSIM Yogyakarta Joko Supriyanto (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persekat Tegal dalam laga uji coba sekaligus peluncuran tim di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu (27/8/2023) sore.

LUNCURKAN TIM DAN JERSEY PSIM Siap Hadapi Liga 2

YOGYA (KR) - PSIM Yogyakarta siap menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2023/2024 dengan meluncurkan skuad tim dan jersey-nya di Stadion Mandala Krida, Minggu (27/8) sore. Kesiapan ini semakin terlihat dengan hasil positif dalam laga uji coba kontra Persekat Tegal yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan 'Laskar Mataram'.

Sebelum laga uji coba kontra Persekat Tegal, PSIM juga meluncurkan jersey kandang dan tandang untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2023/2024. Warna biru sebagai warna khas PSIM, disematkan pada jersey kandang yang mengusung tema 'The Royal Succession'. Jersey ini terinspirasi dari desain jersey yang dikenakan PSIM saat promosi ke liga tertinggi Indonesia pada tahun 1996. Sedangkan pada jersey tandang yang berwarna putih, PSIM menyematkan sedikit sentuhan warna biru dan unsur budaya yang di antaranya ada

* Bersambung hal 7 kol 5


**Analisis
Harga BBM**
Fahmy Radhi

SELAMA sepekan ini terjadi kehebohan di Media Sosial, yang dipicu oleh peredaran rekaman video pendek dari @pojoksatu.id dilangsir Media Tik Tok terkait pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:43	15:03	17:41	18:51	04:26
Senin, 28 Agustus 2023	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

LAYANAN HOMECARE
Nikmati kemudahan dan kenyamanan layanan kesehatan dari tenaga medis terbaik kami tanpa perlu keluar rumah.

- Perawatan Luka
- Pasang & Lepas Infus
- Pasang & Lepas Sonde/NGT
- Ibu Pasca Bersalin dan Bayi
- Pasang & Lepas Kateter
- Merawat dan Pasien

Pendaftaran:
☎ 0811 2855 872 ☎ 0811 2822 303 *Pelayanan B24

Satpol PP Tertibkan Penyalahgunaan SG

Enam Lokasi di Sleman Dibidik

YOGYA (KR) - Penertiban terhadap Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah Sultan Ground (SG) terus dilakukan. Bahkan rencananya pada pekan depan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY akan memanggil sejumlah pengguna tanah SG.

Pemanggilan itu dimaksudkan untuk meminta klarifikasi pengguna SG yang diduga belum mengurus surat kekancingan atau izin tertulis mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah dari kasultanan.

Penertiban akan dilakukan di enam lokasi itu berdasar surat perintah resmi dari pihak Kraton Yogyakarta. Sebab, berdasar Pergub 33/2017 tentang pengelolaan tanah SG dalam klausulnya menyatakan peng-

awasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY.

"Kalau untuk pengawasan dilakukan oleh Dispertaru DIY. Tapi karena ada surat resmi dari Kraton ke Satpol PP, kami bisa melakukan penertiban. Dari laporan yang diterima, tercatat ada enam titik lokasi yang akan dibidik Satpol PP DIY. Semuanya berada di Kapanewon Kalasan Sleman, telah dijadikan

rumah hunian," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Minggu (27/8).

Noviar mengatakan, untuk luas tanah SG yang digunakan beragam, ada 100 hingga 500 meter persegi, di mana keseluruhannya itu merupakan rumah pribadi. Dari enam lokasi telah dideteksi atas dasar laporan dari Kraton dan segera ditindaklanjuti pekan depan. Dalam pemanggilan itu, nantinya mereka akan diminta untuk mengurus surat kekancingan.

"Sebetulnya pelanggaran itu tidak hanya terjadi di 6 lokasi, tapi cukup banyak. Bahkan ada juga yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **SAAT penyerahan hadiah lomba 17-an di wilayah Caturtunggal, seorang kakek diminta naik ke panggung mewakili cucunya menerima hadiah lomba. Ia kemudian berdiri di panggung bersama anak-anak lain yang menerima hadiah. Saat itu sang kakek memakai kostum seperti Presiden pertama RI, Bung Karno, lengkap dengan peci dan kacamata hitam. (Rika Dian Mayawati Amd, Jala Nogopuro Gang III/2 Gowok Caturtunggal, Depok Sleman 55281)-f**

KETUA KOMISI C DPRD DIY GIMMY RUSDIN SINAGA

Jangan Sampai Muncul Lagi 'Jalan Seribu Lubang' di DIY



FORUM DPRD DIY

YOGYAKARTA memiliki banyak julukan. Mulai dari Kota Pelajar, Wisata hingga Budaya. Tak heran, setiap kali masuk tahun ajaran baru, Yogyakarta diserbu banyak calon mahasiswa dari berbagai wilayah di tanah air.

Kepadatan arus lalu lintas setiap kali masuk momen liburan, membukakan Yogyakarta masih memiliki magnet bagi wisatawan. Hampir semua objek wisata dipadati pengunjung. Hotel maupun tempat penginapan penuh. Tidak harus menunggu momen libur khusus, seperti liburan sekolah, lebaran atau akhir tahun. Setiap akhir pekan maupun *long weekend* hampir jalanan di Kota Yogyakarta padat kendaraan. Hanya saja, jalan bagus dan mulus masih terkesan di perkotaan saja. Penampakan jalan tidak mulus terlihat di sejumlah jalan di luar kota.

Coba tengok di jalan yang 'sedikit' lebih masuk kearah perkotaan. Seperti jalan yang statusnya adalah jalan provinsi, kabupaten hingga desa. Kondisinya tidak bisa disebut 'laik' dilewati. Bergelombang dan berlubang. Jalan Godean contohnya. Oleh masyarakat sampai mendapat julukan 'Jalan Seribu Lubang'.

Data dari Bappeda DIY menyebut, persentase jalan yang tidak dalam kondisi mantap mengalami penuru-



Foto : Istimewa

Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga

nan tiap tahun dalam 4 tahun ini. Tahun 2019 sebesar 73,48 persen, tahun 2020 sebesar 71,56 persen, 2021 sebesar 70,52 persen dan 2020 sebesar 70,18 persen.

Menurut Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga, di Yogyakarta sepanjang 670 kilometer jalan provinsi, sebagian di antaranya dalam kondisi rusak. Kondisi ini jangan dibiarkan terlalu lama. Terlebih DPRD DIY telah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai sejumlah jalan yang rusak tersebut, agar segera diperbaiki.

Terkait masalah ini, dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPSDM) DIY diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut.

"Akhir-akhir ini kita sering ke lapangan. Melihat langsung kondisi jalan yang dilaporkan masyarakat. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Baik yang melintas di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo maupun

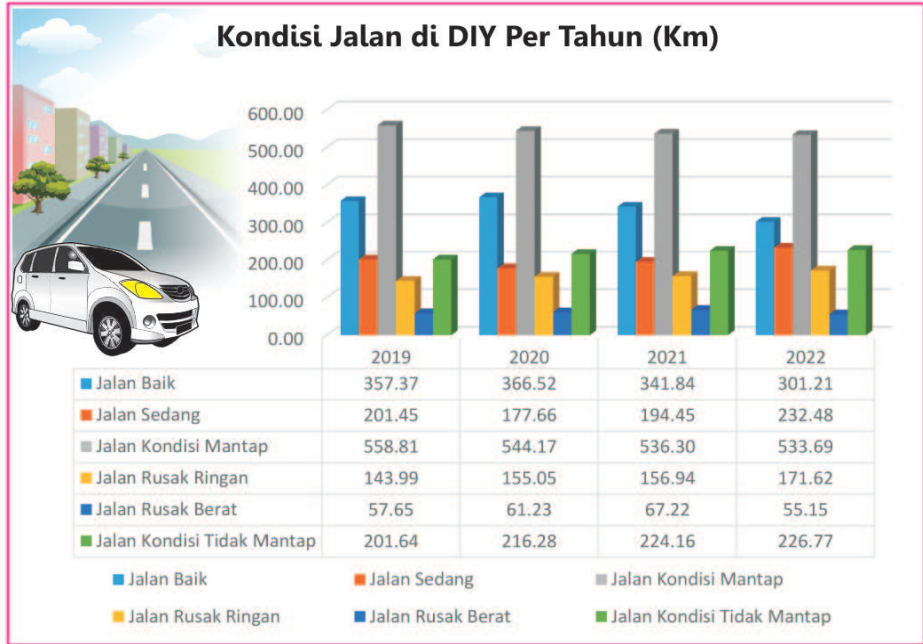
Gunungkidul," tegas Gimmy Rusdin Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam pantauan pihaknya, sejumlah jalan, tidak sebatas rusak saja. Namun juga penerangannya juga sangat minim. "Setidaknya ada 10.000 titik jalan per tahun yang membutuhkan penerangan jalan. Namun, dari Pemda hanya sanggup 100 titik saja setiap tahun," ungkapnya.

Penambahan penerangan jalan ini dirasa penting. Tidak hanya persoalan keselamatan perjalanan, juga kebutuhan sebagai daerah pariwisata. Akan sangat baik jika jalan menuju destinasi wisata juga mendapat dukungan penerangan jalan yang memadai.

Guna mewujudkan keinginan peningkatan kualitas jalan tersebut, membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi. Demikian juga kebutuhan penambahan sejumlah titik penerangan jalan.

Jika melihat kemampuan anggaran di tingkat provinsi, maka terdapat keterbatasan. Sehingga dana yang tersedia, tidak dapat untuk



memenuhi kebutuhan dalam perencanaan. Sehingga selain mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, maka membutuhkan dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Istimewa (Danais).

Pembangunan tersebut tidak hanya sebatas pada jalan nasional, tetapi juga hingga ke jalan-jalan provinsi, hingga lingkungan.

Gimmy Rusdin mengungkapkan salah satu dukungan pemerintah pusat dalam hal pembangunan dan

pemeliharaan jalan, yakni Patuk Terong yang ada di Dlingo, Kabupaten Bantul. Semula APBD DIY merencanakan perbaikan jalan hanya sepanjang 1,5 kilometer saja. Namun, ternyata ada dukungan dana dari pemerintah pusat, melalui Inpres, membuat ruas jalan yang diperbaiki menjadi lebih panjang yakni 4,5 kilometer.

Selain jalan di Patuk Terong, masih banyak jalan rusak yang perlu dukungan pemerintah pusat, baik di Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul. Ke depan, pihaknya terus mendorong kepedulian pemerintah pusat terhadap perbaikan jalan di DIY terus dilakukan. Yakni dengan peningkatan alokasi anggaran untuk DIY.

mengarah ke tempat wisata. Seperti Jalan Kaliurang Sleman, atau jalan mengarah ke Pantai Parangtritis Bantul.

Diungkapkan Gimmy Rusdin, dalam pertemuan dengan pihak OPD terkait, terungkap bahwa pada tahun 2024, anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dinaikkan hingga 50 persen. Jika sebelumnya Rp 20 miliar untuk empat kabupaten, makan akan naik jadi Rp 30 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk gorong-gorong di sekitar jalan yang akan diperbaiki. Gimmy Rusdin berharap ke depannya, jangan ada muncul istilah Jalan Seribu Lubang.

Bus Trans Jogja

Selain persoalan peningkatan kualitas jalan, daya dukung sarana kebutuhan publik dan pusat wisata membutuhkan transportasi massal yang memadai. Salah satu dukungan Pemda DIY dalam hal transportasi publik, yakni penyediaan dan layanan bus Trans Jogja.

Besarnya dukungan daerah terhadap transportasi publik ini, dengan digelontorkan dana cukup besar, sekitar Rp 80 miliar per tahun dari APBD. Tentu, besaran anggaran untuk transportasi publik tentu terus dipantau dan dievaluasi.

Selama ini, Trans Jogja baru bisa menjangkau Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan sebagian Bantul. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo belum bisa mengakses Trans Jogja. "Anggaran Trans Jogja itu besar. Dari provinsi, tapi belum semua masyarakat DIY bisa mengakses. Sejauh ini masukin di tempat kami, agar Trans Jogja bisa mengakses ke sekolah-sekolah," katanya.

Diakui Gimmy Rusdin, banyak surat yang masuk ke DPRD DIY, terkait permintaan penambahan jalur Trans Jogja. Ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan layanan yang lebih jauh. (Awah/*)

Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat
@Krijogjadotcom



KedaulatanRakyat
Kedaulatan rakyat Media



YouTube Kedaulatan Rakyat TV